

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2018:2), akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan domain publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada didalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta unit kerja pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya.

Menurut Majid (2019:6), akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan), dan suatu organisasi publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Menurut Bastian (2010:3), akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana

msyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta.

2.1.1.1 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Menurut *American Accounting Association*(1970) dikutip diMardiasmo (2018:18), mengemukakan tujuan akuntansi sektor publik sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelolasecara tepat, efisien, dan ekonomi atas suatu operasi dan alokasisumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*).
- b. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajer sektor publik untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab atas program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya. Dan memungkinkan pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

2.1.1.2 Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo(2018:3), akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya pebedaan lingkungan yang memengaruhi. Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks. Komponen

lingkungan yang memengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi.

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan per kapita, struktur produksi, tenaga kerja, arus modal dalam negeri, cadangan devisa, nilai tukar mata uang, utang dan bantuan luar negeri, infrastruktur, teknologi, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, serta sektor informal.

b. Faktor Politik

Faktor politik yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain hubungan antara negara dan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik dan massa, jaringan internasional, serta kelembagaan.

c. Faktor Kultural

Faktor kultural yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya, sistem nilai di masyarakat, historis, sosiologi masyarakat, karakteristik masyarakat, serta tingkat pendidikan.

d. Faktor Demografi

Faktor demografi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, serta tingkat kesehatan.

2.1.2 *Good Governance*

Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. Kata “baik” disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*. *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Majid, 2019:19).

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan reformasi kelembagaan (*instutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Kunci reformasi kelembagaan tersebut adalah pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai *stakeholder*, pemerintah daerah sebagai eksekutif, dan DPRD sebagai *shareholder* (Majid, 2019:20). Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen publik, untuk mendukung terciptanya *good governance*, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yaitu (1) reformasi sistem penganggaran (*budgeting reform*), (2) reformasi sistem akuntansi (*accounting reform*), (3) reformasi sistem pemeriksaan (*audit reform*), dan (4) reformasi sistem manajemen keuangan daerah (*financial management reform*).

Good governance akan tercapai jika lembaga pengawas dan pemeriksa berfungsi secara baik. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua prinsip-prinsip *good governance*.

2.1.2.1 Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Peran akuntansi untuk mewujudkan *good governance*, tidak bisa terlepas dari penerapan prinsip *good governance*. Akuntan dan auditor pemerintah mempunyai kewajiban menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Dalam Mardiasmo (2018:23), diijelaskan prinsip-prinsip *good governance* menurut *United National Development Program (UNDP)* yaitu :

a. *Participation*

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat meyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

b. *Rule Of Law*

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

c. *Transparency*

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

d. *Responsiveness*

Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani masyarakat (*stakeholder*).

e. *Consensus Orientation*

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyuluruh dalam hal yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini diharapkan dapat berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

f. *Equity*

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

g. *Efficiency and Effectiveness*

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

h. *Accountability*

Para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi-organisasi yang mewakili rakyat bertanggungjawab kepada publikas setiap aktivitas yang dilakukan. Bentuk pertanggungjawabannya tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung pada jenis organisasi yang bersangkutan.

i. *Strategic Vision*

Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan. Dengan prinsip ini, pembangunan daerah akan didasarkan pada visi dan strategi yang jelas.

2.1.2.2 Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan *Good Governance*

Dalam mewujudkan *good governance*, akuntansi memiliki peran yang signifikan untuk mewujudkan akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, serta efisiensi dan efektivitas.

a. Akuntansi dalam mewujudkan akuntabilitas

Peran akuntansi untuk mewujudkan akuntabilitas sangat penting, karena untuk menunjang terlaksananya target dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga tugas dan wewenang dapat lebih mudah dijalankan. Akuntansi dapat membantu organisasi sektor publik untuk mempertanggungjawabkan tugas dan wewenangnya dengan cara melakukan pengawasan atas semua kegiatan yang akan dikerjakan dan memberikan gambaran atau rancangan agar kegiatan tersebut sesuai target dan sasaran. Target dan sasaran yang telah ditetapkan merupakan patokan untuk menilai kinerja organisasi sektor publik tersebut sudah baik atau belum.

b. Akuntansi dalam mewujudkan transparansi

Peran akuntansi dalam mewujudkan transparansi menjadi hal yang sangat penting, informasi yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik harus akurat dan mempunyai reabilitas yang tinggi. Dan dengan adanya peran

akuntansi juga dapat memudahkan dalam menyusun laporan atas kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.

c. Akuntansi dalam mewujudkan responsibilitas

Peran akuntansi dalam mewujudkan responsibilitas membantu agar nilai *output* yang dikeluarkan sesuai untuk menjalankan suatu program kegiatan agar terlaksana dengan baik. Akuntansi juga berperan untuk mempertanggungjawabkan pengalokasian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar mempunyai nilai yang ekonomis.

d. Akuntansi dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas

Peran akuntansi dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas membantu organisasi sektor publik dalam menentukan penggunaan dana APBD yang telah dianggarkan agar dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang telah diberikan secara efisien dan efektif.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan pondasi utama bagi terciptanya *good governance* yang merupakan persyaratan mutlak dalam ekonomi dan demokrasi. Transparansi dan akuntabilitas juga merupakan faktor utama agar Indonesia tidak tererosok dalam krisis seperti 1997-1998. Indonesia saat ini harus berjuang agar tidak terkena dampak berkelanjutan dari krisis ekonomi global. Dalam keadaan kurang berfungsinya kebijakan moneter, semakin besar harapan ditujukan pada kebijakan fiskal mengatasi krisis dan menggerakkan perekonomian.

2.1.3 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut (Fahmi, 2012:2). Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), laporan keuangan ialah neraca dan perhitungan laba laporan perubahan posisi keuangan (misalnya, laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan integral dari laporan keuangan. Menurut Farid dan Siswanto, laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial.

Menurut Assauri (dikutip di Fahmi, 2012:2), laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Lebih lanjut Assauri menekankan bahwa dalam laporan keuangan terdapat informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan.

Menurut Lev dan Thiagarajan, laporan keuangan yang dipublikasikan dianggap memiliki arti penting dalam menilai suatu perusahaan. Pada setiap perusahaan bagian keuangan memegang peranan penting dalam menentukan arah perencanaan perusahaan. Dengan berfungsinya secara baik bagian keuangan membuat kinerja keuangan yang dilihat dari laporan keuangan membuat kinerja keuangan yang dilihat dari laporan keuangan perusahaan akan tersaji dengan baik (Fahmi, 2012:3).

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (revisi 2017), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi(Harahap, 2011:70). Adapun tujuan laporan keuangan menurut PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia) adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja perusahaan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Mengingat laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, namun apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan yang dimaksud wajib disajikan demikian (Gani, 2018:20).

2.1.4 Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik dilihat pada bentuk organisasi pemerintah yang dikenal sebagai birokrasi pemerintah (organisasi pemerintahan). Secara kelembagaan, organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis. Sedangkan struktur organisasi pada sektor swasta lebih fleksibel. Struktur organisasi yang sangat erat hubungannya dengan fungsi, strategi, dan tujuan organisasi (Mardiasmo, 2018:13).

Menurut Nordiawan (2009:1), organisasi sektor publik merupakan sebuah entitas ekonomi yang memiliki keunikan. Disebut entitas ekonomi karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, melainkan sangat besar. Organisasi sektor publik juga melakukan transaksi ekonomi dan keuangan. Tetapi organisasi sektor publik, sumber daya ekonominya dikelola tidak untuk mencari laba (nirlaba).

Berbagai organisasi terwakili dalam sektor publik di Indonesia, termasuk pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, berbagai perusahaan dimana pemerintah memiliki saham (BUMN dan BUMD), organisasi pendidikan, organisasi kesehatan, dan organisasi masyarakat/massa (Mahsun dkk, dikutip di Risha, 2021:4).

Menurut Fahmi (2012), organisasi publik merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi

pemilikinya. Menurut Stephen P. Robbins, organisasi publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Pengertian organisasi publik berkenaan dengan proses pengorganisasian.

Organisasi sektor publik bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi sebagai pijakan dalam operasionalnya. Organisasi publik berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat tidak pada laba atau untung.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul, Penelitian, Jurnal, Volume, Nomor, Tahun	Variabel yang Diteliti, Alat Analisis, Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Cahyadi Arif.	Penerapan <i>Good Governance</i> Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik	Variabel : <i>good governance</i> . Alat analisis menggunakan metode campuran (<i>mix method</i>). Hasil penelitian: penilaian pendapat	Persamaan teori.	Alat analisis yang digunakan .

		Kartu Tanda Penduduk Berbasis <i>Good Governance</i> Di Kecamatan Sukolilo Surabaya). Volume 2, Nomor 2, Tahun 2016.	masyarakat tentang penerepan <i>good governance</i> dan pelayanan yang dilakukan oleh pegawai Kecamatan Sukokilo dalam pengurusan E-KTP cukup baik.		
2	Ashari Romi dan Budi Ikhsan.	Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> . Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019.	Variabel : <i>good governance</i> . Alat analisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian: peran akuntansi berpengaruh dalam mewujudkan <i>good governance</i> . Dengan adanya akuntansi dapat membantu dalam penyusunan	Persamaan teori, variabel independen, variabel dependen.	Perbedaan dalam teknik pengumpulan data hanya menggunakan wawancara dan dokumentasi.

			rencana kerja dan laporan keuangan yang optimal dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarkan agar sesuai dengan target yang telah disusun.		
3	Novia Risha.	Analisis Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> . Volume 10, Nomor 1, Tahun 2021.	Variabel : <i>good governance</i> . Alat analisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian : dengan adanya akuntansi dapat membantu menyajikan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan laporan kinerja sektor publik. Walaupun ada hambatan tetapi tidak terlalu	Persamaan teori, variabel dependen dan variabel independen.	Perbedaan dalam teknik pengumpulan data hanya menggunakan wawancara dan dokumentasi.

			berdampak terhadap kelangsungan program dan kegiatan yang dilakukan.		
4	Kartika Fauzia.	Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> , audit kinerja, dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karang Anyar. Skripsi Tahun 2017.	Variabel independen : <i>good governance</i> , audit kinerja, dan SAP (X). Variabel dependen : akuntabilitas keuangan (Y). Alat analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian : penerapan <i>good governance</i> , audit kinerja, dan SAP secara simultan mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas	Persamaan teori.	Alat analisis yang digunakan .

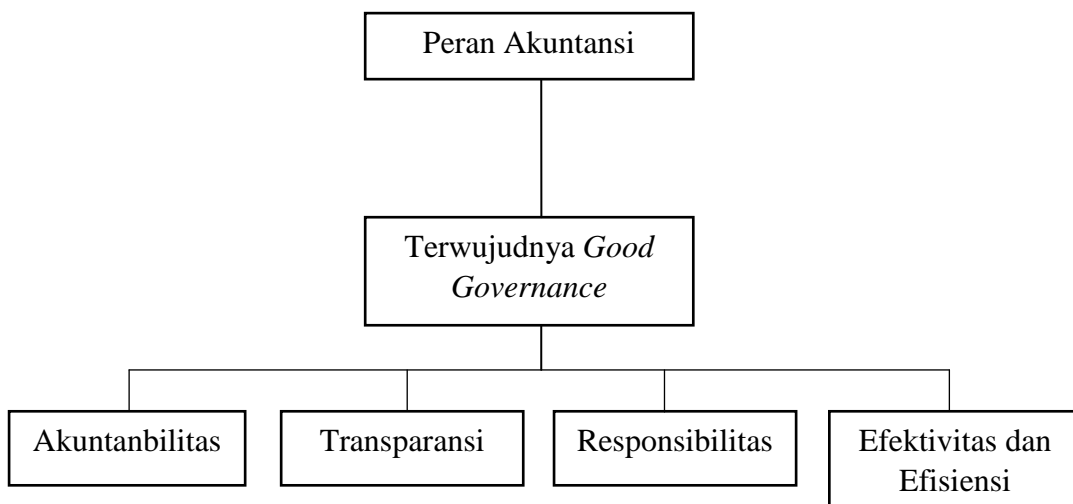
			<p>keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karang Anyar, artinya penggunaan SAP dan audit kinerja dalam pelaporan keuangan sehubungan dengan akuntabilitas keuangan mutlak dilakukan karena terkait dengan kualitas aparatur daerah dalam menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa.</p>		
5	Sinaga Jaminta.	Peranan Akuntansi Manajemen Sektor Publik Menuju <i>Good</i>	<p>Variabel : <i>good governance</i>. Alat analisis menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil</p>	Persamaan teori.	Perbedaan dalam teknik pengumpul an datahanya

		<i>Governance Di</i> Indonesia. Volume 3, Nomor 2, Tahun 2017.	penelitian : peranan akuntansi manajemen sektor publik menuju <i>good</i> <i>governance</i> di Indonesia belum sepenuhnya tercapai. Akuntansi manajemen sektor publik belum sepenuhnya berhasil membantu negara untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia.		mengguna kanwawan cara.
--	--	--	---	--	-------------------------------

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing

variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti (Haryoko, 1999 dalam Sugiyono, 2017:60). Kerangka berpikir akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perludijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen (Sujarweni, 2015:66).



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran